

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk mendapatkan bahan acuan dan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang tentunya sejenis dengan penelitian ini.

Peneliti memilih lima penelitian terdahulu yang berkaitan dengan yang dilakukan peneliti, diantaranya penelitian dari : Lulu Gumanti, Raden Mahendra Haryo Bharoto, Mita Rachmawati, Raja Syahmulia Harahap, dan Iza Zuhriah. Pada tabel 2.1 berikut ini peneliti rangkum sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kajian penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Persamaan dan perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknis Analisis
1.	Lulu Gumanti, Ipik Permana, Moh Sutarjo	Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.	Implementasi Kebijakan	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, Observasi, Pengamatan, Dokumentasi

		Tahun 2020				
2.	Raden Mahendra Haryo Bharoto, Nursahidin	Implementasi Kebijakan Program Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Psikotik Jalanan Di Kota Cirebon. Tahun 2021	Implementasi Kebijakan	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, observasi
3.	Mita Rachmawati, Ety Rahayu	Implementasi Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis melalui Program Bimbingan Keterampilan Kerja di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi. Tahun 2020		Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, observasi
4.	Raja Syahmulia Harahap	Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Medan. Tahun	Implementasi Kebijakan	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, Observasi, Dokumentasi

		2020				
5.	Iza Zuhriah	Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Studi pada Dinas Sosial. Tahun 2019	Efektivitas	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Pertama, menurut hasil penelitian dari Lulu Gumanti, Ipik Permana, dan Moh Sutarjo dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yaitu Implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sudah dilakukan secara efektif tetapi belum sepenuhnya maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kembali. Yang pertama dilihat dari proses pelaksanaan program pembinaan anak jalanan itu pihak dinas belum memberikan pembinaan yang kompleks. Kedua, yaitu dari Sumber Daya Manusia masih sangat kurang, sehingga program pembinaan anak jalanan itu prosesnya agak sedikit terhambat dikarenakan kekurangan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, yaitu minimnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk program pembinaan anak jalanan. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu adanya kesamaan dalam membahas

tentang Implementasi kebijakan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu adanya perbedaan fokus yang diteliti dimana penelitian terdahulu berfokus pada anak jalanan dan peneliti berfokus pada gelandangan dan pengemis.

Kedua, menurut hasil penelitian dari Reden Mahendra Haryo Bharoto dan Nursahidin dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Program Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Psikotik Jalanan Di Kota Cirebon yaitu masih belum optimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu penanganan pengemis gelandangan orang telantar dan psikotik jalanan tersebut belum terfasilitasi dengan baik, anggaran yang belum memadai, sumber daya manusia yang belum kompeten, sehingga implementasi dari pada kebijakan tersebut belum terealisasikan secara optimal. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu adanya kesamaan dalam membahas tentang Implementasi kebijakan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu adanya objek yang berbeda dimana penelitian terdahulu ini objeknya berfokus pada pengemis, gelandangan, orang terlantar dan psikotik jalanan sedangkan peneliti hanya berfokus pada gelandangan dan pengemis.

Ketiga, menurut hasil penelitian dari Mita Rachmawati dan Ety Rahayu dengan judul penelitian Implementasi Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis melalui Program Bimbingan Keterampilan Kerja di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” yaitu Evaluasi

perkembangan WBS dilakukan juga dengan tujuan untuk menentukan WBS yang diikuti program Praktek Belajar Kerja (PBK). Pada akhir sesi pelayanan evaluasi perkembangan warga binaan dilakukan dengan mengundang semua instruktur yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan WBS selama mengikuti bimbingan keterampilan. Beberapa faktor penghambat program, diantaranya adalah faktor kemalasan dan rendahnya motivasi WBS, latar belakang pendidikan WBS yang rendah dan berbeda-beda dari WBS, masalah kejiwaan yang dialami oleh WBS yang dapat mengganggu proses belajar, alat keterampilan dan sarana ruangan keterampilan yang masih dirasa kurang cukup mendukung proses bimbingan keterampilan, belum adanya standar kurikulum yang baku yang ditetapkan pada bimbingan keterampilan, proses bimbingan keterampilan yang diikuti oleh WBS tergolong singkat serta sulitnya mencari tempat PBK atau magang. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu adanya kesamaan dalam membahas tentang Implementasi. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu adanya perbedaan dari program yang diberikan dimana penelitian terdahulu hanya memberikan bimbingan keterampilan kerja sedangkan peneliti ada beberapa program yang diberikan contohnya keterampilan kerja, pelatihan, dan perlindungan khusus.

Keempat, menurut hasil penelitian dari Raja Syahmulia Harahap dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Medan yaitu dalam menjalankan programnya, Dinas Sosial Kota Medan masih banyak hambatan/kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial itu sendiri, yaitu: belum tersedianya panti rehabilitas sosial atau penumpangan untuk pengemis yang tertangkap, percuma saja karena pengemis yang tertangkap hanya dilakukan pendataan setelah itu dibebaskan, kemudian mereka mengulangi perbuatannya karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial sering mendapatkan perlawanan, dan kegiatan penanganan pengemis ini yaitu ditemukannya wajah lama yang pernah terjaring razia. Melihat permasalahan yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan, sejauh ini hasil yang dicapai sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya terealisasi dengan sempurna. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu adanya kesamaan dalam membahas tentang Implementasi kebijakan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu ada pada lokus dan fokus dimana penelitian terdahulu berlokus di Kota Medan dan fokus penelitiannya pada anak jalanan sedangkan lokus peneliti di Kabupaten Cirebon dan berfokus pada gelandangan dan pengemis.

Kelima, menurut hasil penelitian dari Iza Zuhriah dengan judul penelitian Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Studi pada Dinas Sosial yaitu penanganan Gepeng oleh Dinas Sosial Kota Jambi belum sepenuhnya efektif karena beberapa target dan tujuan dari penanganan tersebut, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan lainnya, belum tercapai. Ketidakefektifan ini juga karena ada beberapa faktor penghambat seperti permasalahan lingkungan lokal dan nasional dari permasalahan Gepeng, ketergantungan ekonomi Gepeng, dan juga masalah manajemen dan organisasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu adanya kesamaan dalam membahas tentang penanganan gelandangan dan pengemis pada Dinas Sosial Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu adanya perbedaan fokus penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas kebijakan gelandangan dan pengemis sedangkan peneliti lebih berfokus pada penanganan gelandangan dan pengemis.

1.1.2 Kajian Administrasi Publik

Administrasi publik dalam pengertiannya secara sempit adalah bentuk aktivitas yang dan meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana. Ketik-mengetik dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan administrasi publik secara luas berarti semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Disimpulkan bahwa administrasi ialah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan itu Iskandar (2003:1) mengatakan pengertian administrasi sebagai “Suatu proses pengorganisasian sumber-sumber, sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. ”Kemudian publik adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal.

Menurut Chandle & Plano dala, dalam Keban (2017:8) mendefinisikan:

“Administrasi publik sebagai proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikordinir untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.

Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2019:9) dalam bukunya Teori Administrasi Publik mengatakan bahwa:

“Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan ilmu dan seni yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan bekerjasama dalam melayani masyarakat dengan baik guna mencapai tujuan dalam organisasi publik yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut David H. Rosenbloom (2017:9) mendefinisikan bahwa

“Administrasi publik adalah pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu motor penggerak didalam ruang lingkup kehidupan bernegara untuk mengatur warna negaranya.

Menurut Arifin Abdurachman (1971) Mengemukakan

“Administrasi dalam arti tata usaha kegiatannya meliputi penerimaan surat, penyimpanan surat, korespondensi, penduplikasian, pencatatan-pencatatan pada buku-buku atau kartohtik, pokoknya segala macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan apa yang dinamakan pekerjaan kertas, bahkan yang meliputi juga pekerjaan-pekerjaan penelponan dan penerimaan tamu”.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa administrasi publik adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan peraturan kebijakan

agar dapat mencapai target/tujuan organisasi. dapat dikatakan juga bahwa administrasi publik memiliki peran yang sangat krusial dalam semua aktivitas organisasi.

Menurut Herbert A.Simon (Mulyadi,2018:30) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Menurut Harbani Pasolong (Mulyadi,2018:31) ruang lingkup dalam administrasi yaitu :

1. Kebijakan publik
2. Birokrasi publik
3. Manajemen publik
4. Kepemimpinan
5. Pelayanan publik
6. Administrasi kepegawaian Negara
7. Kinerja
8. Etika administrasi publik

Semua ruang lingkup administrasi mempunyai keterkaitan yang erat dengan kebijakan publik. Jika disimpulkan bahwa administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik melalui pelayanan publik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan melalui manajemen publik dengan didasari oleh birokrasi, kepemimpinan serta etika dan kinerja yang baik.

Administrasi menurut Pasolong (Mulyadi ,2018:33) mengatakan

bahwa:

“Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik dan juga melembagakan praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional”.

Sependapat dengan Nicholas Henry (Mulyadi 2018:34) mengatakan

bahwa:

“Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik supaya lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, Peneliti menarik benang merah bahwa Administrasi Publik merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan dan kepentingan orang banyak. Administrasi publik juga lebih menekankan kepada adanya kajian tentang organisasi pemerintah atau publik itu sendiri seperti bagaimana tingkah laku birokrasinya, manajemen sumber daya manusia nya, pelaksanaannya serta bagaimana implementasi dari kegiatan yang telah dilakukan.

Peran Administrasi Publik

Gray (2017:20) Peran administrasi publik dijelaskan sebagai berikut :

Menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan, Melindungi hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia, Melestarikan nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

2.1.3. Kajian Implementasi

Dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai suatu program ,peranan implementasi kebijakan sangat penting.Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan .Untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan makna dasarnya yakni dari, oleh dan untuk rakyat diperlukan implementasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat melalui desentralisasi yang diwujudkan perannya oleh pemerintah daerah yang dianggap lebih mengenal dan lebih dekat dengan masyarakat lokal. Implementasi dilakukan setelah adanya perumusan kebijakan yang telah ditetapkan.

Definisi implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *implement*. Adapun beberapa definisi implementasi sebagai berikut:

Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Tidak jauh dari apa yang diutarakan oleh Grindle ,Lester dan Stewart Jr (Wahab,2016:129) menyampaikan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses atau pencapaian(output).Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50),

“ Implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi”.

Menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul A.sabatier (Solichin AbdulWahab,2016:135-136) menjelaskan makna implementasi :

“ Implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi Kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun dampak nyata yang ada di masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Pressman dan Wildavsky (dalam Erwan dan Dyah, 2015:20), mengatakan :

“Untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to ful fill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*)”.

Dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program tetapi menyangkut pula pada jaringan politik, sosial dan ekonomi. Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Gordon (Mulyadi, 2018:24) implementasi itu berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi suatu program. Implementasi menurut Jones(mulyadi,2018:45) yaitu *Those Activities directed toward putting a program into effect*”, yang mana artinya adalah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. sedangkan menurut Udoji (Mulyadi,2018:46) mengatakan pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan berupa angan-angan atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi di dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan.

Implementasi menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam Erwan dan Dyah (2015:20) yaitu : “ *policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” setelah diterjemahkan "Implementasi kebijakan mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu publik atau swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya".

Pandangan dari Van meter dan Van Horn bahwa tugas dari implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik terealisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan pihak berkepentingan/*stakeholder* (Mulyadi,2018:48). sedangkan menurut wahyu nurharjadmo (Mulyadi,2018:50) studi implementasi merupakan :

“Studi untuk mengetahui proses implementasi,tujuan proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan,selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah kegiatan pelaksanaan, penyaluran,penerapan atau proses setelah adanya suatu penetapan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan agartujuan tercapai.

Implementasi suatu kebijakan publik itu sangat bergantung pada rumusan kebijakan yang akan disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Alamsyah, 2016 :66).

Menurut Riant Nugroho memberikan makna bahwa “implementasi kebijakan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang” (Alamsyah, 2016 : 79). Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Cleaves “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a process of moving towards a policy objective by means of administrative and political steps*)”.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar- ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Menurut Mulyadi (2018:52) menyatakan bahwa Proses implementasi kebijakan publik berbeda dengan proses pembuatan kebijakan publik. Jika pembuatan kebijakan publik menggunakan proses

logika bottom-up yaitu proses yang diawali dari aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan proses implementasi kebijakan publik menggunakan logika top-down(penurunan alternatif kebijakan yang abstrak menjadi suatu tindakan yang konkret untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Agustino (2016:130) menyatakan bahwa pendekatan top-down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan- keputusan atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh aktor pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh para aparatur, administrator, atau birokrat di semua tingkat terutama pada tingkat bawah.

Unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada tiga menurut Tachjan (Mulyadi, 2018:168) yaitu:

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan
3. *Target group* (kelompok sasaran)

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Dalam perkembangan berikutnya, pemaknaan terhadap implementasi terus mengalami perkembangan. Bagi para peneliti generasi III, contohnya, implementasi dipahami secara lebih kompleks sebagai

sebuah transaksi (pertukaran) berbagai sumber daya yang melibatkan banyak stakeholder.

Secara lebih lengkap Warwick (1982:190) dalam Erwan dan Dyah (2015:21) mengemukakan :

“implementation means transaction. To carry out a program, implementers must continually deal with tasks, environments, clients and each other. The formalities of organization and the mechanics of administration are important as background, but the key to success is continual coping with contexts, personalities, alliances, and events. And crucial to such adaptation is the willingness to acknowledge and correct mistakes, to shift directions, and to learn from doing. Nothing is more vital to implementation than self-correction, nothing more lethal than blind perseveration”

setelah diterjemahkan “Implementasi berarti transaksi. Untuk menjalankan program, pelaksana harus terus menerus menangani tugas, lingkungan, klien dan satu sama lain. Formalitas organisasi dan mekanisme administrasi penting sebagai latar belakang, tetapi kunci sukses adalah terus menerus mengatasi konteks, kepribadian, aliansi, dan peristiwa. Dan penting untuk adaptasi semacam itu adalah kesediaan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan, untuk mengubah arah, dan belajar dari melakukan. Tidak ada yang lebih penting untuk implementasi selain koreksi diri, tidak ada yang lebih mematikan daripada ketekunan buta ”.

Dari definisi-definisi tentang implementasi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul

manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka Panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Upaya untuk memahami implementasi secara lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus (*part of the stage of the policy process*). Implementasi merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses atau siklus suatu kebijakan. Dalam hal ini implementasi dilihat sebagai : “*administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals*”

Peneliti menarik kesimpulan bahwa dengan implementasi kebijakan merupakan cara untuk mengetahui suatu berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan berjalan atau diterapkan.

2.1.4 Kajian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan.

Kebijakan adalah kepandaian, kemandirian, kebijaksanaan dan rangkaian konsep awal yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang

Pemerintah, Organisasi dan sebagainya) prasyarat cita-cita, tujuan atau maksud dengan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.

Dalam studi implementasi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu pelaksanaan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses pelaksanaan.

Grindle dalam bukunya (1980) dalam Herabudin (2016:131) mengatakan bahwa implementasi kebijakan bergantung pada isi dan kontennya, dan tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi komponen variabel sumberdaya implementasi yang diperlukan.

Setelah suatu kebijakan negara memperoleh legitimasi, agar diperoleh *intended impact*, perlu diimplementasikan.

Van Meter dan Van Horn (1978) dalam Erwan dan Dyah (2015:20), merumuskan mengenai proses implementasi sebagai berikut:

“those actions by public of private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”. Makna perumusan diatas adalah bahwa implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Tindakan-tindakan-tindakan tersebut adalah berupa upaya-upaya untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Oleh karena itu maka yang menjadi fokus perhatian

implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang strategis setelah proses perumusan atau perancangannya. Karena pada tahapan implementasi inilah, suatu kebijakan akan diuji, baik secara substansial maupun tingkat efektivitas penggunaannya.

Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari prespektif perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai

aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikatakan dengan program atau dengan undang-undang, dan keputusan yudisial.

Implementasi menjadi “jembatan” karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya Model implementasi menurut Merilee S. Grindle ini merupakan model yang sudah sangat familiar, lalu Model Charles O.Jones, Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn, Model George Edwards III dan masih banyak lagi ,berikut beberapa model implementasi:

1. Model implementasi Merilee S. Grindle

Implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan- tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Isi kebijakan menurut Grindle mencakup:

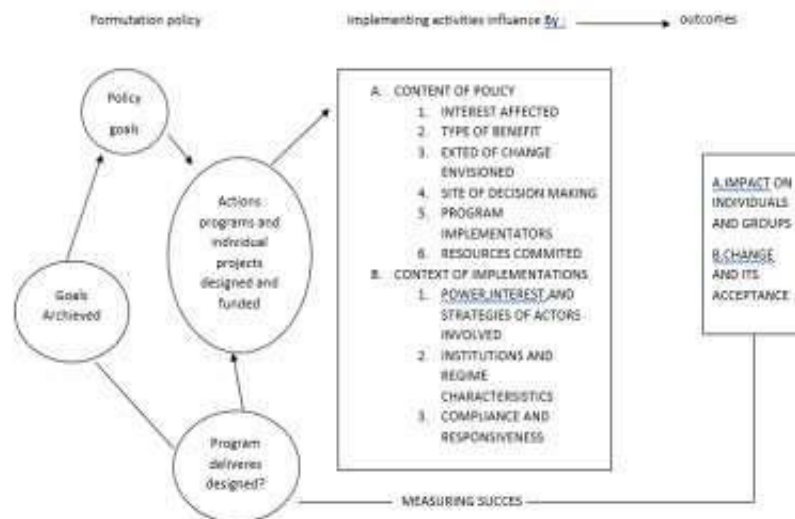
- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) Siapa pelaksana program
- 6) Sumber daya yang dikerahkan

Konteks kebijakan mempengaruhi proses lingkungan implementasi:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi
- 2) Karakteristik lembaga penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap

Berikut adalah gambar dari model yang dikemukakan oleh Merilee S.

Grindle:



Gambar 2.1

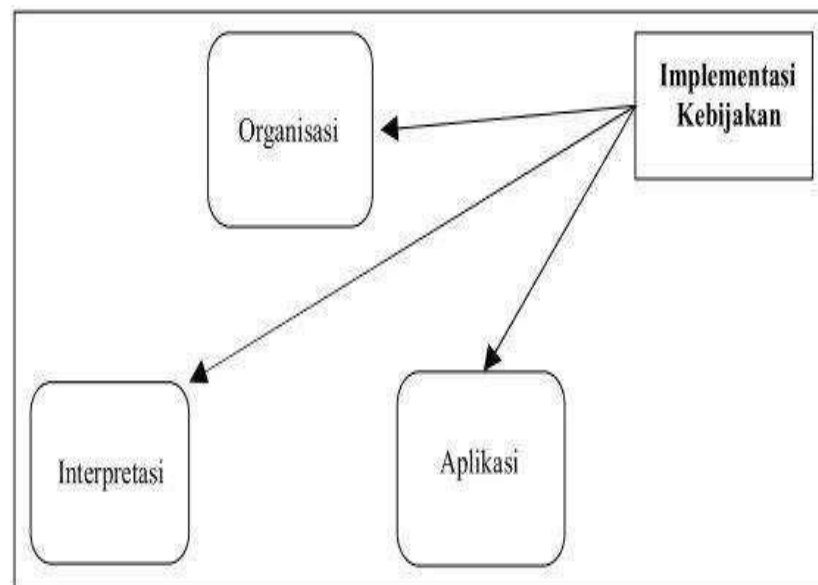
Model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle

2. Model Charles O.Jones

Jones (Agustino, 2016:154) mengatakan bahwa: implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

- 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
- 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, atau bentuk penafsiran komunikasi seperti hal pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan juga harus mengetahui substansinya sebagai tenaga pelaksana serta adanya sosialisasi agar dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
- 3) Aplikasi, (penerapan) berdasarkan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Berikut adalah gambar dari model yang dikemukakan oleh Charles O. Jones :



Gambar 2.2

Model implementasi kebijakan Charles O.Jones

3. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Van Horn (Mulyadi,2018:72) merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

1) Standar dan tujuan kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen pelaksana.

2) Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya ,baik itu sumber dayam manusia maupun sumber daya non-manusia.

3) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam berbagai kasus, implementasi program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4) Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

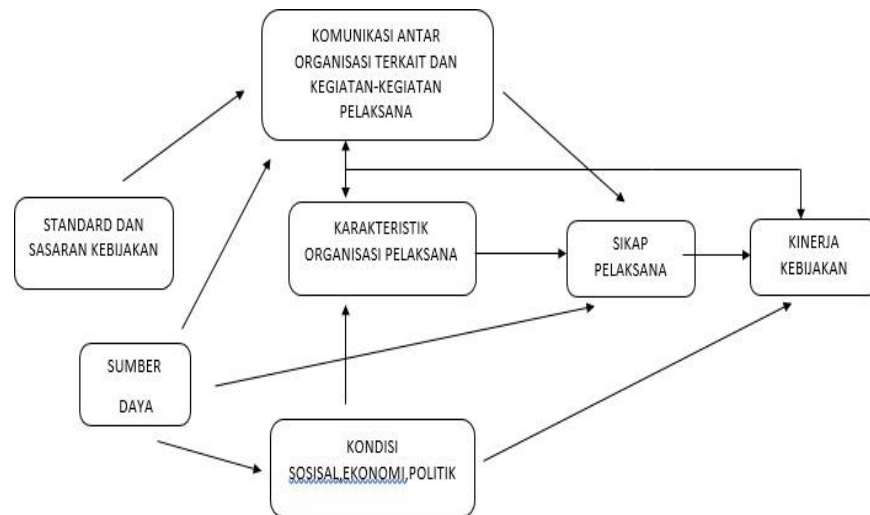
Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu:

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berikut adalah gambar dari model yang dikemukakan oleh Van meter dan Van horn:



Gambar 2.3

Model implementasi kebijakan Van meter dan Van horn

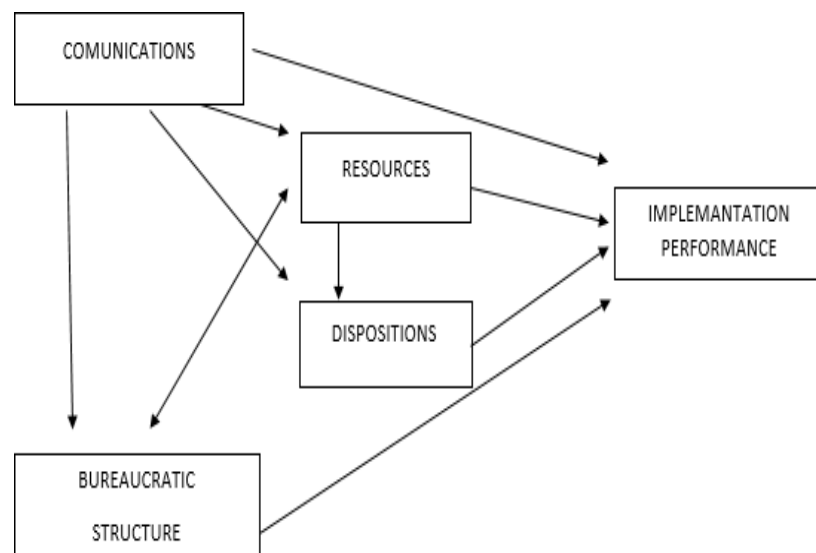
4. Model George Edwards III

Edwards III (1980:1) mengemukakan *“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation?”* (Dalam pendekatan kami untuk studi implementasi kebijakan, kami mulai dari abstrak dan bertanya: Apa prasyarat untuk implementasi kebijakan yang sukses?) Untuk menjawab pertanyaan penting itu Edwards III (1980: 10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam implementasi kebijakan publik, yakni: *“Communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure”*.

Keempat faktor implementasi tersebut dipandang krusial oleh setiap

implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tidak adanya satu faktor, maka tiga faktor lainnya akan berpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik. Menjelaskan empat faktor dimaksud yakni, komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur birokrasi.

Berikut adalah gambar dari model yang dikemukakan oleh Edward III :



Gambar 2.4

Model implementasi kebijakan Edward III

5. Model Hogwood dan Gunn

Dalam Mulyadi (2018:75) Hogwood dan Gunn berpendapat bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat:

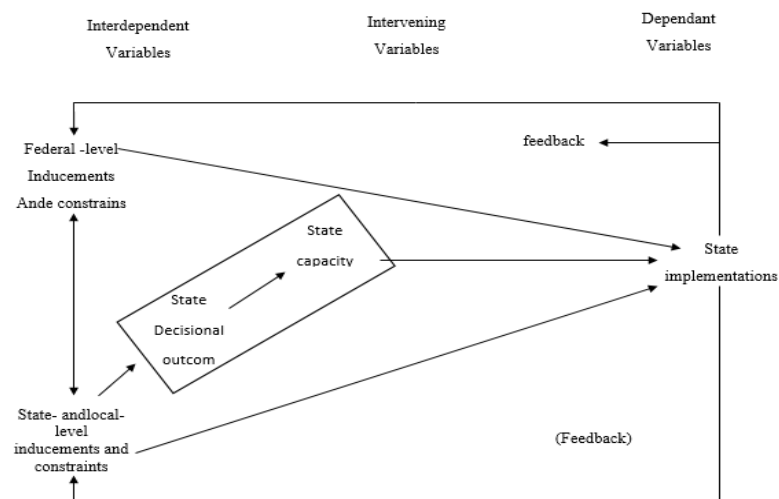
1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badanpelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar
2. Sumber daya yang memadai
3. Sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal andal
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi
6. Seberapa besar hubungan saling ketergantungan
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan yang mendalam terhadap tujuan
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut danmendapatkan kepatuhan yang sempurna.

6. Model Goggin, Bowman dan Lester

Malcolm goggin ,Ann bowman, dan James Lester mengembangkan Generasi ketiga model implementasi kebijakan yang bertujuan

mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel : *independent, intervening and dependent*, dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

Berikut adalah gambar dari model implementasi kebijakan ini:



Gambar 2.5

Model implementasi kebijakan Goggin, Bowman dan Lester

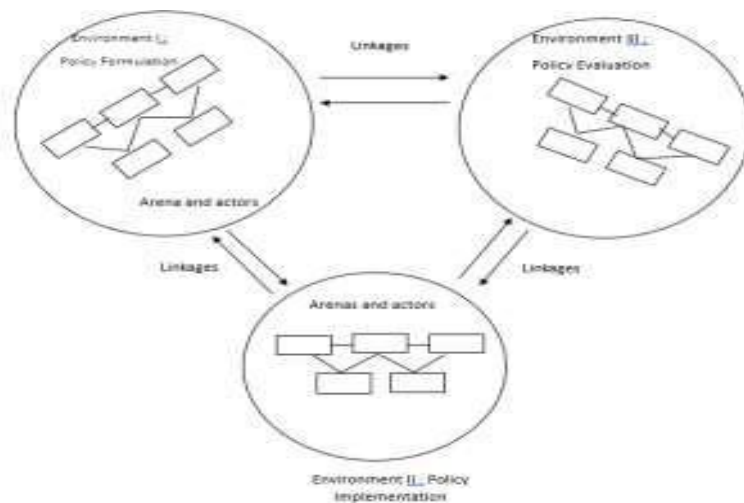
7. Model Richard Elmore, dkk

Model Richard Elmore(1979),Michael lipsky(1971) dan Benny hjern & David O’Porter(1981). Mode ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di dataran rendah.

8. Model Nakamura & Swallowood

Model ini mengembangkan model implementasi kebijakan dengan sebutan *environment influencing implementation*” yang terdiri atas tiga elemen *policy formulation, policy implementation dan policy evaluation*. (Mulyadi ,2018:78-82).

Berikut adalah gambar dari model implementasi kebijakan ini:



Gambar 2.6

Model implementasi kebijakan Nakamura & Smallwood

Berdasarkan uraian model-model para ahli diatas maka peneliti mencoba memilih menggunakan model dari Merilee S. Grindle karena dianggap dapat mengukur dan membantu menjawab penelitian yang sedang diteliti.

Faktor-Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Permasalahan yang kompleks sering terjadi pada implementasi kebijakan baik dalam perumusan suatu program atau pelaksanaan produk kebijakan yang telah ditentukan. Beberapa ahli mencoba memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang tidak bisa satu konsep implementasi diterapkan diseluruh wilayah lingkungan instansi pemerintah atau instansi swasta. Maka dengan itu didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi.

Menurut *Grindle* dalam Agustino (2014:154) mengemukakan bahwa:

Keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
2. Derajat perubahan yang diinginkan
3. Kedudukan pembuat kebijakan
4. Siapa pelaksana program
5. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasi adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa

3. Kepatuhan dan daya tangkap

Erwan (2012:86) mengemukakan ada enam faktor dalam penentu berhasil atau tidaknya implementasi suatu program yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri. Kualitas disini menyangkut banyak hal, seperti kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai.
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur birokrasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan dan lainnya). Struktur organisasi yang terlalu hierarkis tentu akan menghambat proses implementasi.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak terdidik).
6. Kondisi lingkungan geografis sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut beberapa ahli diatas dapat digunakan pada berbagai lingkungan dan kondisi daerah yang berbeda-beda, baik dari segi masyarakat, dari segi perekonomiannya atau segi ekologi lainnya, sehingga dapat mempengaruhi optimalisasi implementasi berjalan tidak baik.

Implementasi Kebijakan pada prinsip nya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan publik tersebut.

Grindle dalam bukunya (1980) dalam Herabudin (2016:131) mengatakan bahwa :

implementasi kebijakan bergantung pada isi dan kontennya, dan tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi komponen variabel sumberdaya implementasi yang diperlukan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program atau dengan undang-undang, dan keputusan yudisial.

Implementasi menjadi “jembatan” karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal senada dikatakan oleh Grindle (1980:6) yang menyebut bahwa “*it involves, therefore, the creation*

of policy delivery system, in which specific means are designed and pursued in the expectation of arriving at particular ends". Yang berarti "Oleh karena itu, ini melibatkan pembuatan sistem penyampaian kebijakan, di mana sarana khusus dirancang dan dikejar dengan harapan mencapai tujuan tertentu".

2.2. Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2014: 60) mengemukakan bahwa: "Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti."

Dalam upaya menyelesaikan rumusan masalah penelitian menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980) dalam Riant Nugroho dalam buku *Public Policy (2011:634)* mengatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi dan konteks implementasinya, dan tingkat keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementabilitas dari kebijakan. Maknanya yaitu sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan dapat berhasil mencapai tujuannya. Ada beberapa variabel penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam pandangan Grindle, implementasi kebijakan di pengaruhi oleh 2 variabel, yaitu :

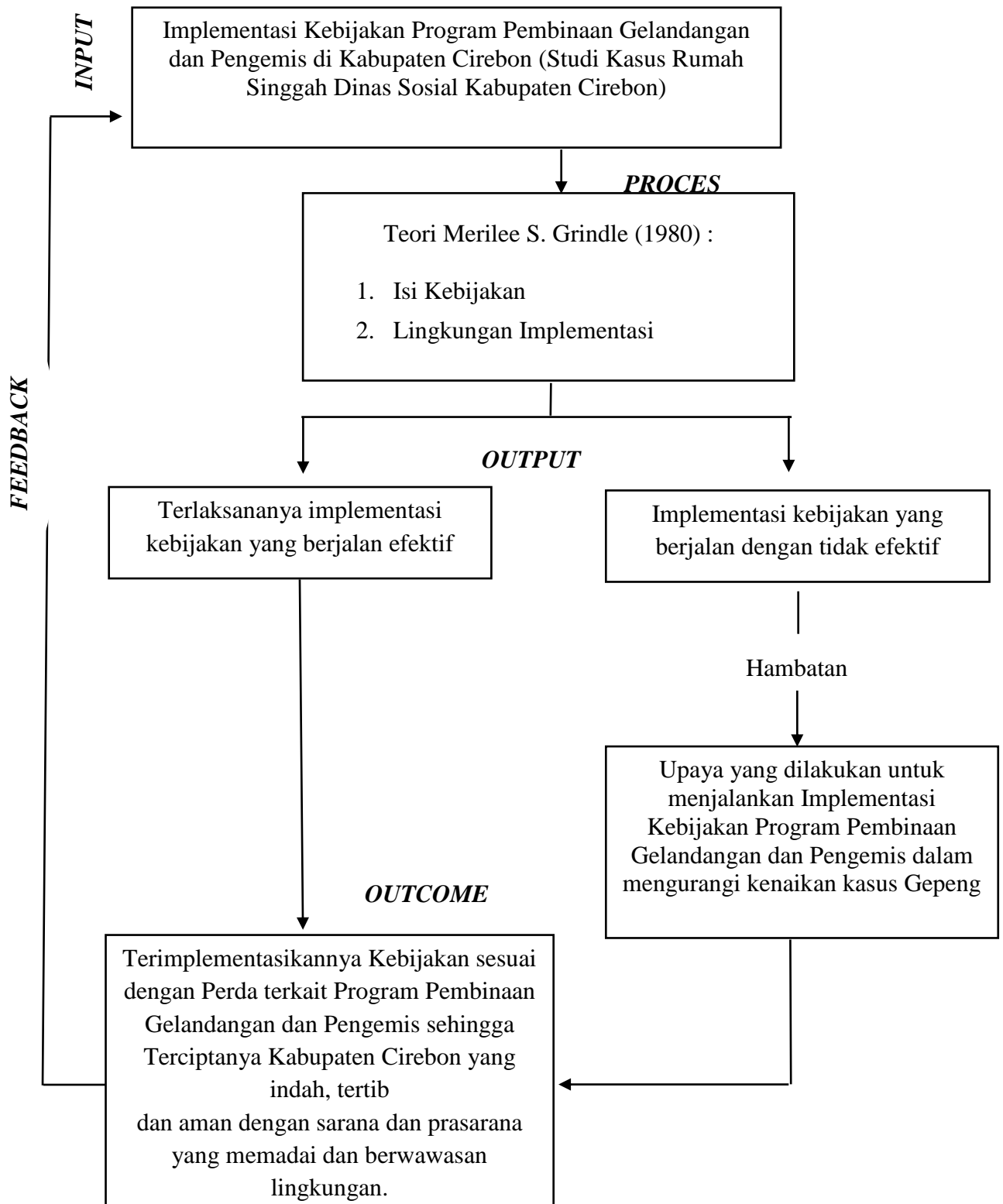
1. Isi Kebijakan

Isi Kebijakan atau konten akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan yang menghendaki perubahan besar, pada umumnya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran sehingga implementasinya mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle antara lain ialah kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program, jenis manfaat yang akan dihasilkan, jangkauan perubahan yang diinginkan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana program, sumber daya yang disediakan, konteks implementasi.

2. Lingkungan Implementasi

Lingkungan Implementasi kebijakan mencakup hal berikut, antara lain besarnya kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik intuisi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

1.1. Bagan Kerangka Berpikir



2.3. Proposisi

Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Cirebon ini akan berjalan secara optimal apabila menggunakan teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, sebab belum berjalan optimalnya suatu kebijakan ini dapat dilihat melalui dua variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah program yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi dimana kebijakan ini diuji dan dianalisis oleh penulis untuk melihat sejauh mana kebijakan ini terimplementasi di lapangan.

